

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR BUKU

Amiruddin & Zainal Asikin. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bachrul Amiq. 2005, *Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Laksbang.

Bambang Waluyo. 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Cipta Karya. 2010, *Profil Kota Tanjungpinang*, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Frenadin Adegustara. 2006, *Diktat Hukum Lingkungan*, Padang: Universitas Andalas.

Hadari Nawawi. 1989, *Pengawasan Melekat (Di Lingkungan Aparatur Pemerintah)*, Jakarta: Erlangga.

Indroharto. 1993, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan.

Kamal Hidjaz. 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.

M. Ali Zaidin. 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Maria Farida, Indrati,. 2007, *Ilmu Perundang-undangan, (Bagian 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius.

Mas Achmad Santosa. 2016, *Alam Pun Butuh Hukum & Keadlian*, Jakarta: Prima Pustaka.

\_\_\_\_\_. 2001, *Good Governance Dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL.

Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

- Peter Mahmud Marzuki,. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M.Hadjon,dkk. 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press University.
- Ridwan H R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Suharsimi Arikunto. 1998, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujamto. 1989, *Norma Dan Etika Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujanto. 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukanda Husin. 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sunggono. 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparto Wijoyo. 1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement Of Enviromental Disputes)*, Surabaya: Airlangga University Press.
- \_\_\_\_\_. 2009, *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Takdir Rahmadi. 2011, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- W. F Prins dan R.Kosim Adisapoetra. 1983, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Otonom Tanjungpinang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Kegiatan penimbunan lahan.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Daerah.

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 230 Tahun 2013 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Di Kota Tanjungpinang.

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah.

## **WEBSITE**

<http://batamtoday.com/home/read/78295/Terkait-penimbunan-hutan-mangrove-ilegal-BLH-dan-Distako-Tanjungpinang-Saling-Menyalahkan>, tanggal 13 oktober 2017 pukul 22.00.

<http://haluan.kepri.com/tanjungpinang/66211-penimbunan-ilegal-hutanmangrove-di-tanjungpinang.html>, tanggal 13 oktober 2017 pukul 22.00.

<http://jdih.tanjungpinangkota.go.id/index.php/profil/hujhakfkak>, pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 00.17.

<http://jdih.tanjungpinangkota.go.id/index.php/profil/>, pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 00.17.

